

# LAPORAN KINERJA 2021



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
KANWIL DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



## BAB I

### PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN memiliki instansi vertikal yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah dan 71 (tujuh puluh satu) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Salah satu kantor operasional DJKN yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) adalah KPKNL Palu yang berkedudukan di Kota Palu dengan wilayah kerja meliputi 13 (tiga belas) kota/kabupaten yaitu:

1. Kota Palu;
2. Kabupaten Banggai;
3. Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kabupaten Banggai Laut;
5. Kabupaten Buol;
6. Kabupaten Donggala;
7. Kabupaten Morowali;
8. Kabupaten Morowali Utara;
9. Kabupaten Parigi Moutong;
10. Kabupaten Poso;
11. Kabupaten Sigi;
12. Kabupaten Tojo Una-Una; dan
13. Kabupaten Toli-Toli.

KPKNL Palu merupakan salah satu instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang berkedudukan di Manado.

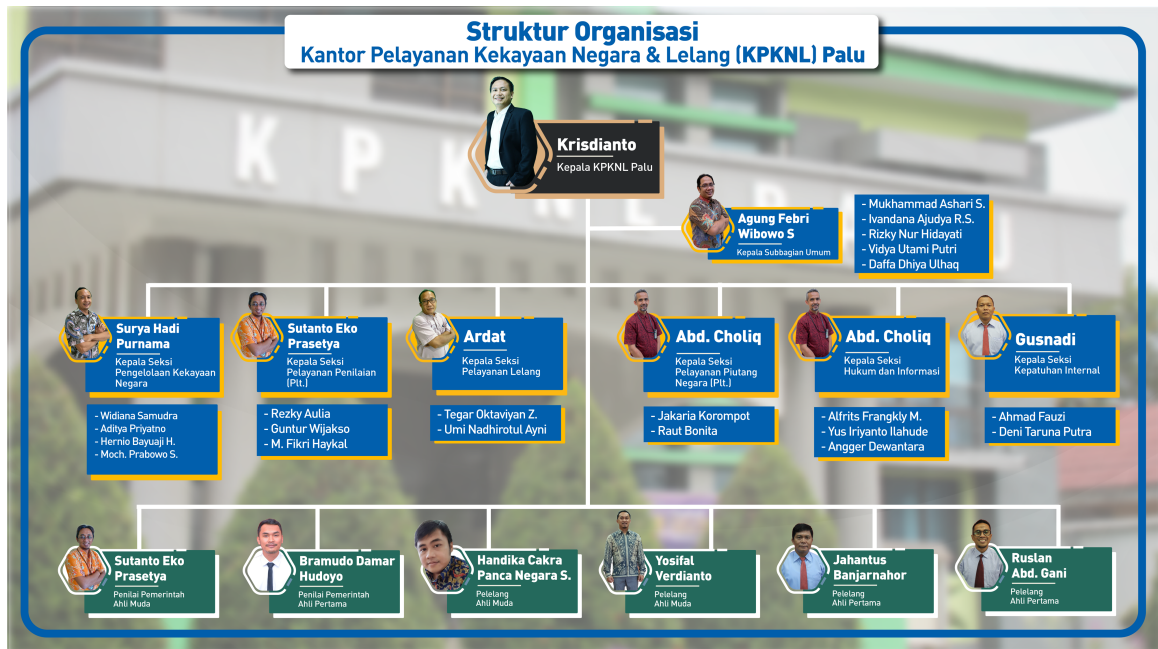
KPKNL Palu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Palu menyelenggarakan fungsi meliputi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung utang dan/atau penjamin utang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau penjamin utang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Adapun susunan organisasi KPKNL Palu terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Pelayanan Penilaian;
- d. Seksi Piutang Negara;

- e. Seksi Pelayanan Lelang;
- f. Seksi Hukum dan Informasi;
- g. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Palu pada saat ini didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, sosial, dan keahlian lainnya.

### A. Peran Strategis

KPKNL Palu sebagai instansi vertikal DJKN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, visi dan misi organisasi sehingga tercapai pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. KPKNL Palu mempunyai peran/aspek strategis antara lain:

1. Subbagian Umum yang merupakan bagian penunjang tugas dan fungsi KPKNL dan mempunyai tugas di bidang kepegawaian diantaranya:
  - menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan formasi pegawai;

- melaksanakan administrasi kepegawaian seperti Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), laporan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), dan KP4;
- mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- mengurus permintaan Taspen, Karpeg, Askes; dan
- menyusun laporan absensi bulanan kantor.

Sedangkan di bidang keuangan Subbagian Umum mempunyai tugas:

- menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berdasarkan dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan
- menyelenggarakan pembayaran gaji/Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) dan/atau penghasilan lainnya.

Pada bagian Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)/inventaris iantor serta pengadaan barang dan jasa tugas Subbagian umum adalah:

- menyelenggarakan inventarisasi BMN pada kantor pelayanan;
- menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan barang/jasa keperluan kantor;
- menyelenggarakan penyimpanan dan pendistribusian barang keperluan kantor; dan
- menyusun konsep rencana penghapusan barang inventaris kantor.

Subbagian Umum juga mempunyai tugas dalam bidang Layanan Umum dan Laporan seperti :

- menyelenggarakan urusan surat masuk dan keluar, dan penggandaan;
- menyelenggarakan penyusutan arsip yang telah memenuhi jadwal retensi arsip;
- melakukan pemasangan iklan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- menyelenggarakan kebersihan, keamanan dan upacara bendera;
- menyusun bahan masukan konsep rencana strategi, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan; dan melaksanakan pembinaan kepada para pelaksana.

2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Palu memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada kegiatan utilisasi BMN, pengukuran kinerja BMN, pengamanan BMN, dan penatausahaan BMN. Untuk tahun 2021, fokus pengelolaan

kekayaan negara ditujukan pada evaluasi kinerja BMN, dan sertifikasi terhadap 1742 (seribu tujuh ratus empat puluh dua) objek bidang tanah.

3. Seksi Pelayanan Penilaian, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam melakukan penilaian BMN dan barang jaminan piutang negara dengan tujuan untuk menentukan Nilai Wajar dan Nilai Likuidasi. Dalam setiap tahapan pengelolaan BMN khususnya penghapusan BMN, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Selain itu, KPKNL Palu juga membantu pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah (BMD), untuk menentukan nilai wajar dalam rangka pemindahtanganan BMD.
4. Seksi Pelayanan Pengurusan Piutang Negara, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penegakan hukum dalam penyelesaian pengurusan piutang Negara/daerah baik kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang Negara, KPKNL Palu berkontribusi dalam pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Biaya Administrasi pengurusan Piutang Negara (Biad PN).
5. Seksi Pelayanan Lelang, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam memberikan layanan lelang yang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara adil dan transparan. KPKNL Palu juga terus berupaya menjadikan lelang sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales means auction*) dengan melakukan penggalan potensi lelang dan menyebarluaskan cara penjualan lelang kepada masyarakat luas. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya produk hukum risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Palu berkontribusi dalam pemasukan PNBP berupa bea lelang. Saat ini, KPKNL Palu juga sudah mengimplementasikan Lelang Internet (*e-auction*) yang memiliki banyak keunggulan, diantaranya: lelang menjadi lebih mudah, dapat diakses di manapun dan kapanpun,

lebih efisien karena tidak membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi bagi para pesertanya, penawaran lebih cepat dilakukan karena penawaran lelang dapat dilakukan begitu pengumuman lelang sudah diunggah pada situs lelang DJKN ([www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)) dan penawaran langsung diterima dalam hitungan detik, dan *e-auction* ini telah memberikan kontribusi hasil lelang yang lebih optimal dibandingkan dengan lelang konvensional.

6. Seksi Hukum dan Informasi, memiliki peran melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
7. Seksi Kepatuhan Internal, berperan dalam melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional di KPKNL Palu terdiri dari Pejabat Fungsional peladang dan Penilai.

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Palu saat ini didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Palu berdasarkan golongan, gender, dan tingkat pendidikan, dan umur adalah sebagai berikut:

**TABEL 1**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja, Eselonisasi, dan Golongan**

Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Eselon					Golongan			
		II	III	IV	JF	Non	IV	III	II	I
Kepala Kantor	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Subbagian Umum	6	0	0	1	0	5	0	1	5	0
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	5	0	0	1	0	4	0	4	1	0
Seksi Pelayanan Penilaian	5	0	0	0	2	3	0	2	3	0
Seksi Piutang Negara	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0

Seksi Pelayanan Lelang	7	0	0	1	4	2	0	6	1	0
Seksi Hukum dan Informasi	4	0	0	1	0	3	0	3	1	0
Seksi Kepatuhan Internal	3	0	0	1	0	2	1	0	2	0
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

TABEL 2

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

GENDER	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Perempuan	0	3	1	0	4
Laki-Laki	0	11	16	2	29
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>33</b>

TABEL 3

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SD	0	0	0	0	0
SLTP	0	0	0	0	0
SLTA	0	0	1	0	1
D1	0	1	0	0	1
DIII	0	11	0	0	11
D4/S1	0	0	12	0	12
S2	0	0	6	2	8
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>33</b>

TABEL 4

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan

KELOMPOK UMUR	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	0	12	6	0	18
31-40	0	0	7	0	7
41-50	0	0	5	2	7
Diatas 50	0	0	1	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>33</b>

**TABEL 5**  
**Tenaga Fungsional KPKNL Palu**

No.	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	SK Jafung
1	Juru Sita	2	Belum Jafung
2	Pejabat Lelang	4	Sudah
3	Penilai	2	Sudah
4	Pemeriksa	3	Belum Jafung

## B. Isu Strategis

Adapun Isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi pada KPKNL Palu dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Isu strategis pada Seksi PKN adalah:

- a. Berkoordinasi dengan satker K/L di wilayah Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara seperti pengelolaan BMN dan pemanfaatan BMN;
- b. Memberikan bimbingan teknis kepada satker K/L di wilayah Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAN secara *online*;
- c. Memberikan *reward* dan *punishment* kepada satker K/L di wilayah Sulteng terhadap kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi BMN;
- d. Pada awal tahun 2021 masih berkonsentrasi penyelesaian atas perbaikan penilaian kembali Barang Milik Negara tahun 2017-2018 sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
- e. Upaya pencapaian manfaat ekonomi Barang Milik Negara dalam bentuk PNBP dan penghematan biaya (*cost saving*);
- f. Membantu dan mengkoordinasikan pensertifikatan BMN berupa tanah pada satker di wilayah Sulteng sebanyak 1742 (seribu tujuh ratus empat puluh dua) bidang tanah; dan

- g. Melaksanakan evaluasi kinerja BMN dan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).
2. Isu strategis pada Seksi Piutang Negara adalah:
    - a. Perlunya segera dilakukan sosialisasi serta upaya penegakan hukum pengurusan piutang negara/daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mengingat masih ada SKPD yang belum memahami/mengerti alur pengurusan piutang negara/daerah; dan
    - b. Target penyelesaian atas piutang yang tinggi dibandingkan potensi piutang yang dapat tertagih.
  3. Isu strategis pada Seksi Lelang adalah:
    - a. Mendukung terwujudnya kelancaran pelayanan lelang sebagai salah satu penerimaan PNPB. Untuk itu perlu mengoptimalkan kinerja para pejabat lelang dan pejabat fungsional pelelang dengan memberikan penyegaran bagi para pejabat lelang dan pejabat fungsional pelelang, memberdayakan Balai Lelang, dan memaksimalkan penggunaan aplikasi penunjang lelang (*e-Auction*);
    - b. Mewujudkan keikutsertaan masyarakat luas untuk menggunakan lelang sebagai salah satu sarana jual/beli yang aman, mudah, transparan, dan mendapat perlindungan hukum; dan
    - c. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara/daerah yang lebih baik khususnya pemindahtanganan BMN dan/atau BMD.
  4. Isu strategis pada Seksi Penilaian adalah:
    - a. Penilaian BMN dengan tujuan pengelolaan BMN dalam bentuk pemanfaatan, dan pemindahtanganan, serta turut andil dalam perolehan PNPB dari pengelolaan BMN tersebut.
    - b. Adanya kepercayaan Aparat Pemeriksa Fungsional pada Pemerintah Daerah yang mempercayakan penilaian BMD dilakukan oleh Penilai KPKNL Palu, sehingga beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah telah mengajukan permohonan penilaian BMD dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMD.

KPKNL Palu dalam melaksanakan penilaian BMD tetap mengedepankan asas profesionalisme dengan mengutamakan tugas dan fungsi penilaian BMN. Dalam kurun waktu 2021 KPKNL Palu telah menyelesaikan permohonan penilaian BMD dengan menerbitkan 203 (dua ratus tiga) laporan penilaian dengan tujuan penilaian adalah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMD;

- c. Kegiatan pembinaan penilai tetap perlu dilaksanakan agar penilai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan diklat mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi penilaian, diskusi, *peer review*, dan verifikasi kompetensi penilai pemerintah.

5. Isu strategis pada Subbagian Umum adalah:

- a. Berperan aktif dalam menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai dalam rangka mendukung layanan unggulannya KPKNL Palu;
- b. Pandemi *Covid19* yang dimulai pada tahun 2020 masih berdampak pada kinerja di 2021, diantaranya adalah adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak juga pada kegiatan pegawai dikantor dan pembatasan jumlah anggaran karena sebagian besar dialihkan untuk penanganan *Covid19* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemotongan anggaran yang dilakukan sampai 4 (empat) kali pada tahun 2021 membuat beberapa program Subbagian Umum tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2021 terutama terkait dengan pemeliharaan gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin. Pemotongan anggaran juga mengakibatkan dukungan teknis ke masing-masing seksi di KPKNL Palu tidak berjalan sesuai dengan semestinya;
- c. Dengan diserahkannya gedung perkantoran KPKNL Palu yang berada pada Jalan S. Parman Kota Palu kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Sulawesi Tengah, maka KPKNL Palu harus memindahkan dan menata ulang arsip yang berada pada gedung tersebut ke gedung arsip yang berada di

belakang kantor. Pemindahan, pendataan dan penataan ulang arsip tersebut membutuhkan waktu agar sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku; dan

d. Seiring dengan penggunaan tata naskah dinas secara elektronik maka diperlukan dukungan teknis di jaringan internet yang stabil, begitu juga dengan pengelolaan arsip elektronik yang berbeda dengan pengelolaan arsip fisik.

6. Isu strategis pada Seksi Hukum dan Informasi adalah:

- a. Mewujudkan kelancaran penanganan/penyelesaian kasus perkara gugatan di pengadilan, penyajian informasi/kehumasan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara yang efektif;
- b. Mewujudkan pengelolaan data dan penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang cepat dan akurat, pengawasan sistem aplikasi yang terkendali serta pengelolaan jaringan komunikasi data yang baik sehingga informasi tersaji sesuai kebutuhan; dan
- c. Melaksanakan proses penerimaan hasil pengurusan piutang dan lelang serta penerimaan negara lainnya secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan;

### C. Tantangan/Hambatan

1. Luasnya wilayah kerja

Luas provinsi Sulteng adalah ±67.000 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 1 kota dan 12 kabupaten. KPKNL Palu juga melayani 404 (empat ratus empat) satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga, Perbankan, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah sehingga koordinasi dengan pihak-pihak tersebut memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama, dengan ketersediaan biaya yang terbatas.

2. Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran satker dalam pengelolaan BMN karena kurangnya dukungan peraturan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu.
3. Penerapan tata naskah dinas secara elektronik pada aplikasi *Office Automation* Kementerian Keuangan (Nadine), serta pelaksanaan *join domain* pada Kementerian Keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi pegawai untuk beradaptasi dan merubah pola kerja.
4. Belum memadainya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu, seperti jaringan internet yang terkadang mengalami kendala sehingga *bandwidth* menjadi lambat dan spesifikasi komputer pengolah data yang terbatas.
5. Besarnya Piutang Daerah yang belum diurus sesuai ketentuan peraturan perundangan pada SKPD di Wilayah Sulawesi Tengah. Di samping itu, piutang negara/daerah yang telah diproses saat ini, banyak yang tidak didukung dengan kelengkapan data seperti data-data perusahaan bila debitur/penanggung utang berbentuk badan hukum, serta tidak adanya barang jaminan utang. Sebagian debitur/penanggung utang tidak didukung dengan adanya barang jaminan, dari 42 (empat puluh dua) debitur/penanggung utang, hanya terdapat 15 (lima belas) debitur yang memiliki barang jaminan, serta debitur/penanggung utang tidak diketahui keberadaannya atau perusahaan penanggung utang sudah tidak beroperasi.
6. Tidak lengkap/tersedianya berkas lelang yang mengakibatkan penanganan perkara di pengadilan menjadi tidak maksimal.
7. Tidak diketahui nama penyetor/penanggung utang pada saat pembayaran angsuran dari penanggung utang melalui rekening bank sehingga bendahara penerimaan mengalami kesulitan dalam memonitor uang yang masuk. Untuk itu, diperlukan koordinasi antara bendahara penerimaan KPKNL Palu dengan pihak penyerah piutang/kreditur secara berkala melalui rekening bank yang tidak diketahui.
8. Perlunya sosialisasi lebih lanjut kepada pejabat lelang kelas i, ii, balai lelang dan *stakeholder* mengenai peraturan perundang-undangan maupun aplikasi yang menunjang pelayanan seksi lelang. Kurangnya pemahaman pengguna layanan

lelang terhadap pelaksanaan lelang *online* serta jaringan internet yang tidak stabil membuat pelaksanaan lelang *online* terkendala. Sulitnya pemenang lelang untuk melakukan proses balik nama kendaraan bermotor dalam pelaksanaan lelang khususnya eksekusi barang rampasan berupa kendaraan dengan perolehan berasal dari pembelian yang dibiayai lewat perusahaan pembiayaan/*leasing* dan belum lunas karena dokumen kepemilikan (BPKB) dikuasai pihak ke III (perusahaan penyedia jasa pembiayaan).

9. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang dalam rangka penanganan perkara terkait sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas.

#### D. Sistematika Pelaporan

Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Bab I. Pendahuluan**, yang menguraikan secara umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic Isus*) yang dihadapi organisasi.

**Bab II. Perencanaan Kinerja**, yang menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Palu Tahun 2021.

**Bab III. Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan:

- a. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan:
  - 1) membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
  - 2) membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
  - 3) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- 4) membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  - 5) menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  - 6) menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
  - 7) menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- b. Subbab realisasi anggaran menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV. Penutup**, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**Lampiran**. Pada bagian ini memuat Perjanjian Kinerja dan dokumen lain-lain yang dianggap perlu.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah merupakan suatu proses yang dilakukan KPKNL Palu dalam menentukan strategi untuk melakukan kegiatan sesuai sistem. Untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi agar mempunyai keunggulan kompetitif, KPKNL Palu perlu menetapkan perjanjian kinerja dalam bentuk kontrak kinerja dengan seluruh pegawainya. Penetapan/perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Sementara itu dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Sepanjang tahun berjalan, dilaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi secara berkala atas kinerja masing-masing pegawai dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja.

Bimbingan dan konsultasi tersebut dilakukan oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang. Pada periode tahun berjalan, juga dilakukan penilaian kinerja dan penilaian perilaku. Hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan umpan balik untuk proses pembimbingan dan konsultasi serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pada tahun 2021, KPKNL Palu mengalami 2 (dua) kali masa kepemimpinan kepala kantor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1201/KM.1/UP.1/2021 tentang Mutasi dan Oengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada Tahun 2021, KPKNL Palu memiliki 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan uraian dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS). Target dari 20 IKU KPKNL Palu tahun 2021, disajikan pada tabel di bawah ini.



## KONTRAK KINERJA

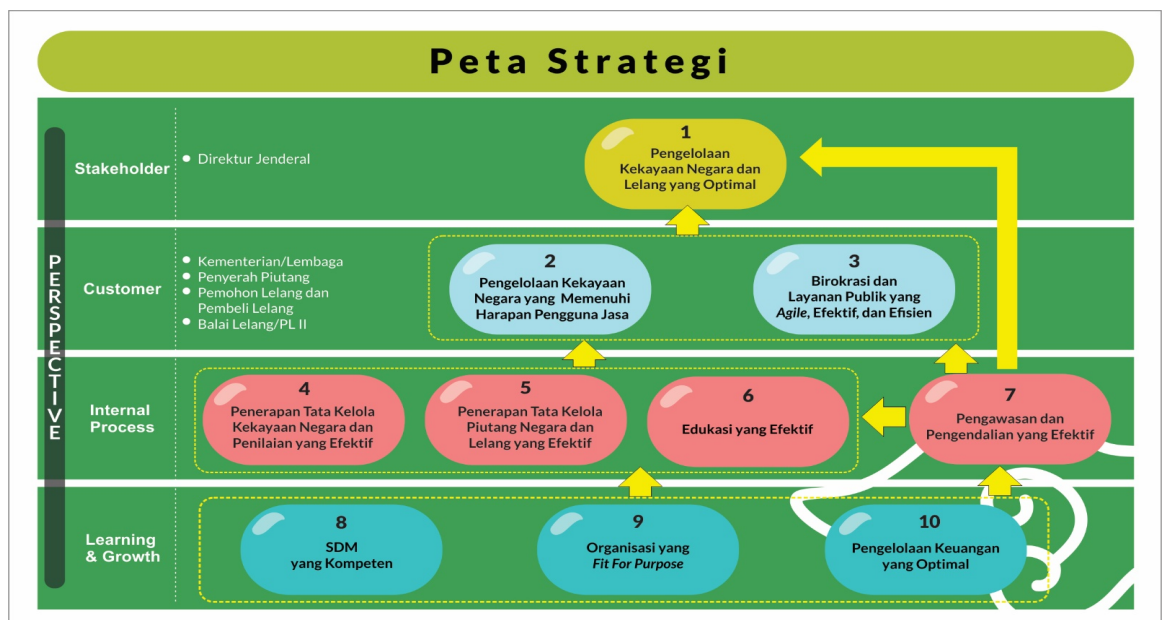
NOMOR 8/KN.28/2021

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2021

### Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU**  
**UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-N Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	88
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,68
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang dDisertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	34%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
9.	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK	75
		9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		9c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10-a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp193.653.000,00</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp5.062.000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp33.092.000,00
3. Pengelolaan Aset	Rp155.499.000,00
<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp1.334.145.000,00</b>
1. Legislasi dan Litigasi	Rp13.272.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.309.417.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp1.440.000,00
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp10.016.000,00

Manado, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara  
Tengah Gorontalo dan Maluku Utara,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
Dan Lelang Palu

Aloysius Yanis Dhaniarto  
NIP 196601261991031001

Devi Lesilolo  
NIP 196503031985031001

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU  
KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU  
UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021**

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>							
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa</b>							
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88	88	88	88	88	88	88
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien</b>							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,68	4,68
<b>4</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif</b>							
4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%

<b>5</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>								
	5a- CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	5b- CP	Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
	5c- CP	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	5d- CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
<b>6</b>	<b>Edukasi yang Efektif</b>								
	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	89	89	-	89	89	89
<b>7</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>								
	7a- CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
<b>8</b>	<b>SDM yang Kompeten</b>								
	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
<b>9</b>	<b>Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i></b>								
	9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	-	-	-	-	-	75	75
	9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
	9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80	80

10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
	10a- CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Manado, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Palu

Devi Lesilolo

### Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG DINILAI	
1	Nama	Aloysius Yanis Dhaniarto	1	Nama	Devi Lesilolo
2	NIP	196601261991031001	2	NIP	196503031985031001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda, IV/c	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tingkat I, IV/b
4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	5	Unit Kerja	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	100	12 bulan	-
3	Menurunkan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	100%	100	12 bulan	-
4	Mewujudkan Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	88	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan Realisasi Pokok Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
6	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	4,68	100	12 bulan	-
7	Mensertifikasi Bidang tanah BMN	-	100%	100	12 bulan	-
8	Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	100	12 bulan	-
9	Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian	-	78%	100	12 bulan	-
10	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKPN		100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan Produktivitas Lelang		35%	100	12 bulan	
12	Melaksanakan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	-	92%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	87,5%	100	12 bulan	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
14	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	89	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	85%	100	12 bulan	-
17	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
18	Mewujudkan Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	-	75	100	12 bulan	-
19	Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	75	100	12 bulan	-
20	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	-	80	100	12 bulan	-
21	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100	12 bulan	-

Manado, 29 Januari 2021

Pejabat Penilai,

PNS yang Dinilai,

Aloysius Yanis Dhaniarto  
NIP 196601261991031001

Devi Lesilolo  
NIP 196503031985031001

**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN**  
**MALUKU UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	12 Bulan	Seksi PKN	

Manado, 29 Januari 2021  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu,

Devi Lesilolo  
NIP 196503031985031001

## KONTRAK KINERJA

NOMOR 8/KN.28/2021

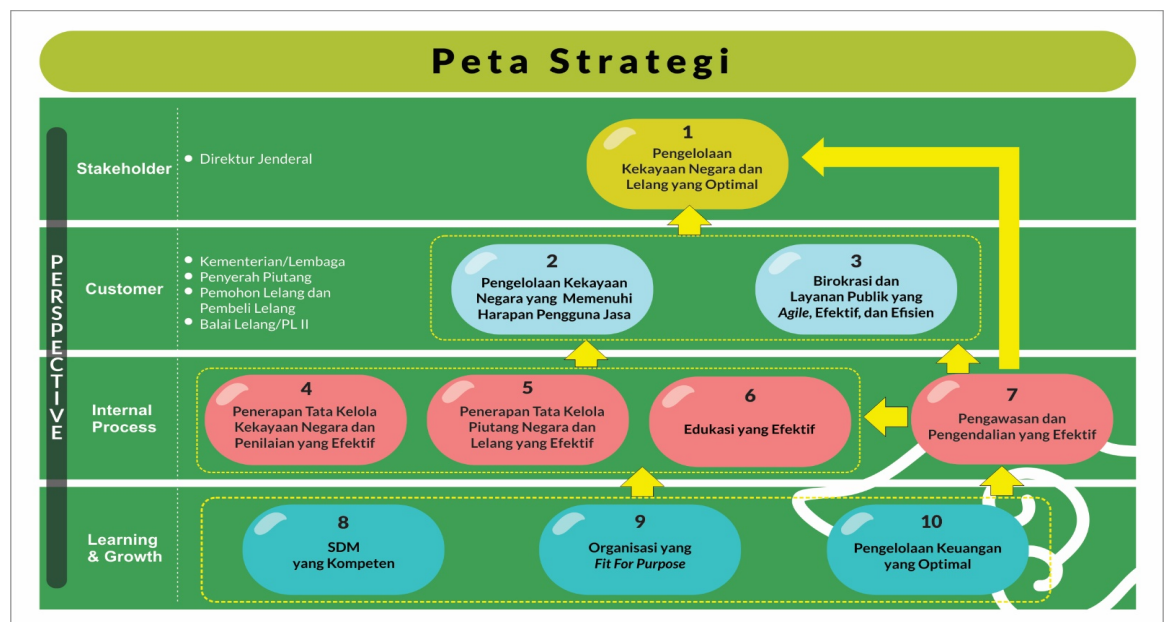
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2021



### Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU**  
**UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	5,76%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	19,49%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,68
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	7,41%
		4b-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5b-CP Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%
		5c-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
		9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp133.252.000,00</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp3.426.000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp150.000,00
3. Pengelolaan Aset	Rp129.676.000,00
<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp1.281.211.000,00</b>
4. Legislasi dan Litigasi	Rp16.208.000,00
5. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.257.083.000,00
6. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp1.440.000,00
7. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp6.480.000,00

Manado, 12 Oktober 2021

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi  
Utara Tengah Gorontalo dan Maluku  
Utara,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Palu

Arif Bintarto Yuwono

Krisdianto

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU  
KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU  
UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021**

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>							
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	-	-	-	-	62%	62%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	-	-	-	-	5,76%	5,76%
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>							
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	-	-	-	-	88	88
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	-	-	-	-	19,49%	19,49%
<b>3</b>	<b>Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien</b>							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,68	4,68
<b>4</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif</b>							
4a-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	-	-	-	-	7,41 %	7,41 %
4b-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	-	-	-	-	-	22%	22%
<b>5</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>							
5a-CP	Persentase Produktivitas Lelang	-	-	-	-	-	35%	35%
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	-	-	-	-	-	92%	92%
5c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	-	-	-	-	12,5 %	12,5 %
<b>6</b>	<b>Edukasi yang Efektif</b>							
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	89	89

7	<b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>								
	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	-	-	-	-	85%	85%
8	<b>SDM yang Kompeten</b>								
	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	-	-	-	-	100%	100%
9	<b>Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i></b>								
	9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	-	-	-	-	-	75	75
	9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
	9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	-	-	-	-	80	80
10	<b>Pengelolaan Keuangan yang Optimal</b>								
	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	-	95,5 %	95,5 %

Manado, 12 Oktober 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Palu,

Krisdianto

## Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA TENGAH  
GORONTALO DAN MALUKU UTARA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU

PERIODE PENILAIAN:  
1 OKTOBER S.D. 31 DESEMBER  
TAHUN 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Krisdianto	NAMA	Arif Bintarto Yuwono
NIP	198105242001121001	NIP	197109121997031001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1.1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1.2 Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	5,76% (Rp629.950.476)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2.1 Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88
		2.2 Persentase Realisasi Pokok Lelang	19,49% (Rp20.656.000.000)
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,68
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4.1 Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	7,41% (2 NUP)
		4.2 Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5.1 Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5.2 Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%
		5.3 Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang Efektif	6.1 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7.1 Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8	SDM yang Kompeten	8.1 Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%

9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	9.1 Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
		9.2 Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9.3 Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10.1 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
B. KINERJA TAMBAHAN			

Pegawai yang Dinilai,

Manado, 12 Oktober 2021  
Pejabat Penilai Kinerja,

Krisdianto  
NIP 198105242001121001

Arif Bintarto Yuwono  
NIP 197109121997031001

**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN**  
**MALUKU UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	3. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 4. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	3 Bulan	Seksi PKN	-

Manado, 12 Oktober 2021  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Palu,

Krisdianto  
NIP 198105242001121001

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Pada subbab ini akan disajikan capaian kinerja organisasi KPKNL Palu untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Adapun Capaian kinerja KPKNL Palu 2020, disajikan pada tabel pada halaman 33-34 berikut.

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU *Kemenkeu-Three* Tahun 2021 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama *Kemenkeu-Three* sebagai berikut :

#### NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 2021 KPKNL PALU

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30,00%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							120,00%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	74,53%	19%	40%	120,214%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	125,94%	14%	30%	125,941%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	138%	14%	30%	138,02%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,43%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							116,02%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	88,00	97,65	11%	44%	110,96%	110,96%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	189,52%	14%	56%	189,52%	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							102,99%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,68	4,82	21%	100%	102,99%	102,99%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							33,13%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							114,11%	
4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	106,35%	19%	43%	106,35%	106,35%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	125,93%	11%	25%	125,93%	120,00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	3,01%	14%	32%	186,32%	120,00%	hijau

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa	Indeks Max.	Keterangan
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							116,43%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	120,83%	14%	25%	120,83%	120,00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00%	40,95%	14%	25%	117,01%	117,01%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conve	P/M	92,00%	100,00%	14%	25%	108,70%	108,70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	12,50%	0,00%	14%	25%	200,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							101,40%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	89	90,25	14%	100%	101,40%	101,40%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							109,80%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	93,33%	14%	100%	109,80%	109,80%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							33,93%	
8	SDM yang kompeten							120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							119,17%	
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	75	94,59	14%	33%	126,12%	120,00%	hijau
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	88,13	14%	33%	117,51%	117,51%	hijau
9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	96,58	14%	33%	120,72%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							100,16%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,65%	14%	100%	100,16%	100,16%	hijau
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)							113,49%	hijau

## 1. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

### a. IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Realisasi IKU Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2021 sebesar 74,53% dari target yang telah ditetapkan 62% (120,21%). Hal ini mencerminkan pelaksanaan IKU persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2021 telah berjalan dengan baik. Hambatan yang dialami yaitu lambatnya pengumpulan formulir dari satker yang terlibat dalam proses IKU SBSK, hal ini diakibatkan diberlakukannya pembatasan selama pandemi *covid-19* yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan perhitungan secara langsung sehingga memerlukan bantuan satuan kerja. Untuk itu, koordinasi dengan satuan kerja secara daring yang lebih intens perlu dilakukan.

### **b. IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

- 1) Realisasi capaian IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2021 sebesar Rp13.775.400.754 (125,941%%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp10.938.000.000 (100%), IKU ini terdiri dari 3 (tiga) komponen PNBPN, terdiri dari pengelolaan BMN, PNBPN piutang negara, dan PNBPN lelang. Realisasi penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang sampai desember 2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan;
- 2) Langkah yang telah diambil untuk meraih capaian tersebut adalah dengan upaya sosialisasi dan penggalan potensi kepada para satuan kerja yang intens tentang pengelolaan BMN melalui pemanfaatan dan penjualan BMN; dan
- 3) Penggalan potensi lelang juga banyak dilakukan kepada pihak Pemerintah Daerah dalam rangka pemindahtanganan BMD.

### **c. IKU Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara (Saldo PNDS s.d 2017)**

Realisasi capaian IKU Tingkat Penurunan *outstanding* piutang negara (saldo PNDS s.d 2017) tahun 2021 sebesar Rp2.293.948.538,36 (138,02%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.662.000.000 (100%) yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan sampai desember 2021 capaian tingkat penurunan *outstanding* piutang negara telah melampaui target yang telah ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi debitur yang kurang kooperatif, dan debitur tidak ditemukan keberadaannya diantaranya dengan optimalisasi upaya penagihan, salah satunya dengan menghubungi penanggung hutang secara intens dan berkoordinasi secara simultan kerjasama dengan beberapa instansi terkait.

## **2. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

### **a. IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara dan Lelang**

Realisasi IKU indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang sebesar 110,96% dari target 88 sudah tercapai 97,65 dan bila dibandingkan tahun 2020 sebelumnya dengan capaian 91,77 (105,48%) atau terjadi peningkatan pada penyelesaian *Standard Operation Procedure* (SOP) layanan unggulan dari masing-masing seksi (Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Hukum dan Informasi, dan Pelayanan Lelang) KPKNL Palu tahun 2021. Hal ini merupakan bentuk fleksibilitas dalam bekerja dalam situasi pandemi, yang menyebabkan tidak adanya pelayanan secara tatap muka. Detail realisasi IKU tersebut dengan rincian sebagai berikut:

**Lampiran:**

**Perhitungan IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan  
Negara dan Lelang  
KPKNL PALU**

**Sampai dengan Q4 Bulan Desember 2021**

No	Jenis Layanan	Capaian
<b>A</b>	<b>Layanan yang Menjadi Objek Pemantuan Pengendalian Intern</b>	
1	Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL	92,50
2	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100,00
3	Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	97,69
4	Penetapan Jadwal Lelang	100,00
5	Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang	NIHIL
6	Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang	100,00
7	Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang	100,00
8	Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)	100,00
9	Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)	100,00
10	Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL	100,00
11	Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara	NIHIL
12	Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan	NIHIL
13	Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas	NIHIL
14	Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai	NIHIL
Rata-Rata Nilai Capaian		98,91

**b. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang**

Capaian persentase realisasi pokok lelang KPKNL Palu tahun 2021 mencapai 189,52% (Rp200.889.103.431) dari target yang ditetapkan yaitu senilai

Rp106.000.000.000 (100%). Lebih rinci, realisasi pokok lelang terdiri dari realisasi pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I senilai Rp33.045.953.831 dan Pegadaian senilai Rp167.843.149.600. Capaian ini berhasil diraih oleh KPKNL Palu sejak gencarnya dilakukan penggalan potensi lelang kepada Pemerintah Daerah di seluruh wilayah kerja KPKNL Palu.

### 3. Sasaran Strategis Birokrasi dan Layanan Publik Yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

#### a. IKU Kepuasan Pengguna Layanan Pada Kantor Pelayanan

Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Palu tahun 2021 telah mencapai angka 4,82 (102,99%) diatas target yang ditetapkan sebesar 4,68. Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan, KPKNL Palu tahun 2021 lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan SOP layanan unggulan. Survei indeks kepuasan pengguna layanan dilakukan kepada stakeholder dari Seksi Penilaian, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi PKN, dan Seksi Piutang Negara. Selain itu, hal yang harus diperhatikan agar mendapatkan hasil survey yang diharapkan yaitu menentukan responden dari *stakeholder* dan memastikan kesamaan persepsi *stakeholder* dalam memahami kuesioner.

### 4. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

#### a. IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Jumlah BMN berupa bidang tanah yang telah diidentifikasi telah maupun belum bersertifikat pada kementerian lembaga didasarkan pada data aplikasi SIMANTAP. Pada tahun 2021 target sertifikasi bidang tanah sebanyak 1.638 objek dan telah tercapai sebanyak 1.742 bidang tanah (106,35%). Bila dibandingkan sebelumnya target 62 objek sertifikat tanah dengan capaian 62 bidang tanah (100%), hal ini mencerminkan IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan mengalami kenaikan dalam hal target dan juga pencapaiannya. Hal ini dicapai dengan dilakukannya koordinasi pihak satker dan Kantor Pertanahan secara intens dan upaya *updating* verifikasi pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SIMANTAP).

**b. IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Realisasi capaian IKU persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) mencapai sebesar 34 (tiga puluh empat) dari target 27 (dua puluh tujuh), atau sebesar 125,93% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan pelaksanaan IKU persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) telah dijalankan dengan baik. Langkah pergeseran objek tujuan evaluasi kinerja yang sebelumnya terletak di Luar Kota Palu menjadi BMN pada satuan kerja yang terletak di Kota Palu merupakan langkah yang tepat selama situasi pandemi yang menyebabkan mobilitas pegawai menjadi menurun.

**c. IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian**

Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian oleh KPKNL Palu mencapai 3,01% dari target yang ditetapkan yaitu 22%. Hal ini menggambarkan persentase capaian terhadap target yang positif yaitu mencapai 186,32%. Capaian ini diraih dengan melakukan koordinasi dengan satker terkait permohonan penilaian yang diajukan serta meminta data yang dibutuhkan guna membantu dalam analisa perhitungan nilai. Kendala yang dihadapi selain pandemi yang menyebabkan menurunnya mobilitas pegawai, adalah nilai yang diajukan satker lebih tinggi daripada nilai wajar yang dihasilkan setelah dilakukan penilaian dan data isian pada formulir yang disampaikan satker tidak valid (khusus dalam hal penilaian yang tidak dilakukan survei lapangan). Karenanya, perlu dilakukan koordinasi dengan satker terkait permohonan penilaian yang diajukan serta meminta data yang dibutuhkan guna membantu dalam analisa perhitungan nilai dan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal nomor 6/KN/2020 terkait pelaksanaan penilaian di masa pandemi *covid19*.

**5. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif****a. IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian Berkas Kepengurusan Piutang Negara (BKPN)**

Realisasi persentase efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2021 sebesar 120,83% dari target 100%, target 24 (dua puluh empat) BKPN dengan capaian penyelesaian 29 (dua puluh sembilan) BKPN. Hal ini mencerminkan pencapaian IKU telah

terpenuhi dengan baik. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mencapai realisasi tersebut yaitu dengan menghubungi penanggung hutang secara intens dan berkoordinasi secara simultan kerjasama dengan beberapa instansi terkait.

#### **b. IKU Persentase Produktivitas Lelang**

Realisasi frekuensi lelang selama tahun 2021 mencapai 503 kali. Persentase capaian produktivitas lelang sebesar 40,95% dari target sebesar 35% (dengan indeks 117,01%). Meskipun telah dilakukan sosialisasi dengan pembeli potensial sebelum pelaksanaan lelang melalui pengumuman pada koran maupun katalog yang dibagikan melalui media sosial, namun belum pulihnya perekonomian Kota Palu secara keseluruhan adanya dampak dari gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melanda Kota Palu, Kab. Sigi, dan Kab. Donggala pada tanggal 28 September 2018 silam, dan kondisi pandemi *covid-19* yang mengakibatkan adanya penarikan berkas lelang dari pemohon lelang. Selain itu, intensitas lelang BMD yang meningkat juga terhadap objek-objek yang mengalami kerusakan akibat usia dan juga terkena dampak dari gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melanda Kota Palu, Kab. Sigi, dan Kab. Donggala pada tanggal 28 September 2018 silam, menjadikan kondisi barang yang tidak baik sehingga tidak menarik perhatian bagi calon pembeli. Pasar pembeli lelang lebih banyak didominasi oleh pengepul besi tua dibanding masyarakat umum.

#### **c. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction***

Realisasi IKU capaian persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* sebesar 100% dari target 92% (dengan indeks 108,7%). Hal ini mencerminkan pelaksanaannya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tentu pandemi menjadikan semua pengguna layanan agar lelang diselenggarakan secara *online* (*e-auction*).

#### **d. IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN**

Realisasi IKU capaian deviasi data PNBPN fungsional DJKN yaitu sebesar 0% dari target sebesar 12,5%. (Persentase terhadap capaian sebesar 200%). Hal ini dicapai dengan sosialisasi kepada satker tentang pembukuan data PNBPN Biad PN dan Bea Lelang seiring dengan kurangnya pemahaman satuan kerja terhadap pembukuan

data PNBPN Biad PN dan Bea Lelang menimbulkan rawannya kesalahan pada proses tersebut oleh satuan kerja.

## **6. Sasaran Strategis Edukasi Yang Efektif**

### **a. IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi**

Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2021 menghasilkan indeks 90,25 dari indeks target sebesar 89, atau sebesar 101,02%. Jika dibandingkan indeks capaian yang dihasilkan tahun sebelumnya yang sebesar 89,78 dari indeks yang telah ditetapkan 88 (102,2% dari target), maka persentase capaian terhadap target untuk tahun 2021 mengalami kenaikan. Kegiatan dalam IKU ini meliputi sosialisasi penatausahaan dan pengelolaan BMN yang dilaksanakan oleh seksi PKN maupun terkait lelang yang dilakukan KPKNL Palu oleh Seksi Pelayanan Lelang dan Seksi Piutang Negara serta sebagai narasumber pada sosialisasi yang dilaksanakan beberapa satker K/L maupun pemerintahan provinsi/kota/kabupaten.

## **7. Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif**

### **a. IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara**

Realisasi IKU persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tahun 2021 adalah sebesar 93,33% (indeks 109,8%) dari target sebesar 85%. Meski begitu, ke-tidak-segera-an satker dalam menindak lanjuti surat persetujuan yang diterbitkan kerap terjadi dan bahkan masih banyak yang belum menaati peraturan terkait pengelolaan BMN.

## **8. Sasaran Strategis SDM yang Kompeten**

### **a. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

Realisasi IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2021 adalah sebesar 120% (indeks 120%) dari target sebesar 100%. Hal ini dapat tercapai karena posisi penempatannya telah sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti. Selain itu kegiatan *sharing knowledge* secara periodik sebagai upaya pemenuhan kompetensi dalam hal jam pelatihan.

## 9) Sasaran Strategis Organisasi yang *Fit for Purpose*

### a. IKU Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM

Realisasi IKU nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM KPKNL Palu mencapai 94,59, atau 126,12% dari target yang ditetapkan (75). Nilai ini diraih dengan melakukan pembentukan tim kerja pembangunan ZI-WBK KPKNL Palu dan juga usaha intimasi terhadap *stakeholder* KPKNL Palu. Hambatan yang ditemui dalam pemenuhan capaian ini adalah Penatausahaan/pendokumentasian dokumen pada tahun-tahun sebelumnya belum tertib, menyulitkan pegawai dalam mengumpulkan bukti bukti dokumen yang disyaratkan.

### b. IKU Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja

Realisasi nilai hasil review pengelolaan kinerja di tahun 2021 adalah sebesar 88,13 dari target IKU 75 (indeks 117,51%). Hal ini tetap mencerminkan kualitas pengelolaan kinerja di KPKNL Palu sudah baik. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu pemahaman pegawai atas pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Card* (BSC). Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan kinerja pada KPKNL Palu.

### c. IKU Efektivitas Pelaksanaan *Forum Group Discussion* (FGD) Pejabat Administrator

Realisasi indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai di tahun 2021 adalah sebesar 97,05 dari target IKU 80 (indeks 121,31%). Hal ini dilakukan dengan mengupayakan agar materi yang disampaikan pada saat FGD lebih familiar dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

## 10. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Optimal

### a. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Untuk persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Palu telah mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 95,65 % dari target 95,5 % (100,16% dari target). Bila dibandingkan tahun sebelumnya mencapai target sebesar 96,34% dari target 95% bila diindeks (95,18%). Dalam IKU ini terdiri dari 2 (dua) komponen dari capaian SMART DJA dengan bobot 60% dari 92,97% (berdasar capaian SMART DJA 31 Desember 2021) dan IKPA 40% dari 99,67% dengan 13 (tigabelas) hal yang

menjadi unsur perhitungan yaitu persentase capaian pengelolaan Uang Persediaan (UP), data kontrak, kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Hal III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian Tagihan, konfirmasi capaian output, rekon LPJ, perencanaan kas, realiasi, pagu minus, dispensasi SPM.

Selama tahun 2021, KPKNL Palu telah melaksanakan pengelolaan anggaran dengan cukup baik dengan catatan telah berhasil dikarenakan target IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 95,65% dari target 95,5%. Pelaksanaan anggaran telah optimal ini harus menjadi evaluasi agar tahun depan pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, terencana, dan terorganisir dengan baik serta mengacu pada kontrak kinerja Kemenkeu-*three*. Kendala yang dialami yaitu nilai penyerapan anggaran atas pagu netto rendah, target IKU yang diamanatkan tidak tercapai. Karena itu, KPKNL Palu melakukan pemetaan Rencana Penarikan Dana (RPD) ulang, percepatan belanja modal, dan mengintruksikan seluruh unit untuk membuat rencana kerja perjalanan dinas dan juga melakukan revisi anggaran sesuai arahan terkait pandemi.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, diperlukan dukungan sumber daya keuangan guna membiayai program dan kegiatan dimaksud. Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan KPKNL Palu berasal sepenuhnya dari APBN yang dituangkan dalam DIPA nomor SP DIPA-015.09.2.538002/2021 tanggal 23 November 2020 yang terinci dalam tabel berikut.

No	Uraian	Pagu DIPA	Blokir	Sisa Pagu	Realisasi	
					Rp	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
2	Belanja Barang	1.352.564.000	0	42.293.490	1.310.270.510	96,87
3	Belanja Modal	61.899.000	0	100,001	61.798.999	99,84
	Total	1.414.463.000	0	42.393.491	1.372.069.509	97

Pada Tahun 2021, KPKNL Palu tidak memiliki DIPA untuk Belanja Pegawai, besarnya realisasi DIPA untuk tahun 2021 adalah sebesar 1.372.069.509,- dari target sebesar Rp1.414.463.000,-. Realisasi penyerapan DIPA untuk tahun anggaran 2021 dimaksud telah sesuai digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, dan dari aspek keuangan itu sendiri telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah merupakan amanat dalam Permenpan Nomor 53 tahun 2014 bahwa Menteri/Pimpinan lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut KPKNL Palu menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, yang merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban hasil perjanjian kinerja yang telah disepakati antara pimpinan dan bawahan dari sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dengan kewenangan yang diberikan dalam melakukan pengelolaan dan penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, dan sekaligus berperan dalam PNPB dalam rangka peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis KPKNL Palu lima tahunan (2020-2024). Pengukuran kinerja sasaran didasarkan pada penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2021 telah ditetapkan 10 sasaran strategis dan 20 IKU yang merupakan indikator Kontrak Kinerja KPKNL Palu tahun 2021.

Secara umum, seluruh pencapaian sasaran strategis selama tahun 2021 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tanpa ada satu IKU pun yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja secara keseluruhan tersebut merupakan hasil kerja seluruh staf, pegawai dan pejabat di jajaran KPKNL Palu termasuk pegawai pemerintah non pegawai negeri serta pegawai *outsourcer*.

Keberhasilan tersebut diantaranya adalah :

- Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2021 sebesar Rp13.775.400.754 (125,941%%) dari target yang telah ditetapkan sebesar

Rp10.938.000.000 (100%), IKU ini terdiri dari 3 (tiga) komponen PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang.

- Penerimaan hasil pengurusan piutang negara terdiri dari Piutang Negara yang berasal dari Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) s.d. 2017 dapat dicapai dengan realisasi sebesar Rp2.293.948.538,36,- dari target sebesar Rp1.662.000.000,-. Adapun target jumlah BKPN tahun 2021 sebanyak 24 berkas berhasil direalisasikan sebanyak 29 berkas, dengan demikian target persentase hasil pengurusan piutang Negara dapat direalisasikan sebesar 120,83%. Capaian ini diperoleh dari Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) maupun pelunasan hutang oleh debitur, mencapai hasil yang cukup signifikan yang merupakan dampak proses pengurusan piutang yang telah dilakukan KPKNL Palu.
- Persentase penyerapan DIPA tahun 2021 yang mencapai 95,65% dari target 95,5% (Barang dan Modal). Capaian target berhasil diraih agar untuk tahun depan pelaksanaan persentase penyerapan dapat dilaksanakan dengan eksekusi yang lebih terencana dan terorganisir dengan baik dan mengacu pada kontrak kinerja.

Dengan menganalisa IKU tersebut, maka dapat dibuat *Action Plan* yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja pada KPKNL Palu pada tahun berikutnya. Untuk meningkatkan jumlah frekuensi lelang pada tahun 2022, KPKNL Palu akan melakukan penggalan potensi lelang ke instansi/lembaga yang beragam dan sosialisasi serta penyebaran informasi ke masyarakat umum.

Sedangkan berkaitan dengan pengurusan piutang negara, pada tahun 2022 KPKNL Palu akan lebih mengoptimalkan penegakan hukum dalam pengurusan Piutang Negara Kementerian dan Lembaga dan Piutang Daerah. Khusus Piutang Daerah akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Anggota PUPN Cabang yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang merupakan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan pengelolaan BMN diharapkan pada tahun 2022 akan lebih ditingkatkan baik proses penilaian dan pengelolaan maupun edukasi kepada instansi pengguna layanan. Perlu sinergi dalam melakukan peran DJKN dalam pengelolaan BMN sehingga diharapkan memberi dampak bagi penerimaan negara, serta aset negara dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kiranya Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan pedoman yang harus diimplementasikan oleh KPKNL Palu dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada periode berikutnya, sehingga di masa yang akan datang KPKNL Palu dapat semakin tampak potensinya, meningkatkan kinerjanya, dan makin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah yang memberikan pelayanan yang profesional.

## LAMPIRAN

## KONTRAK KINERJA

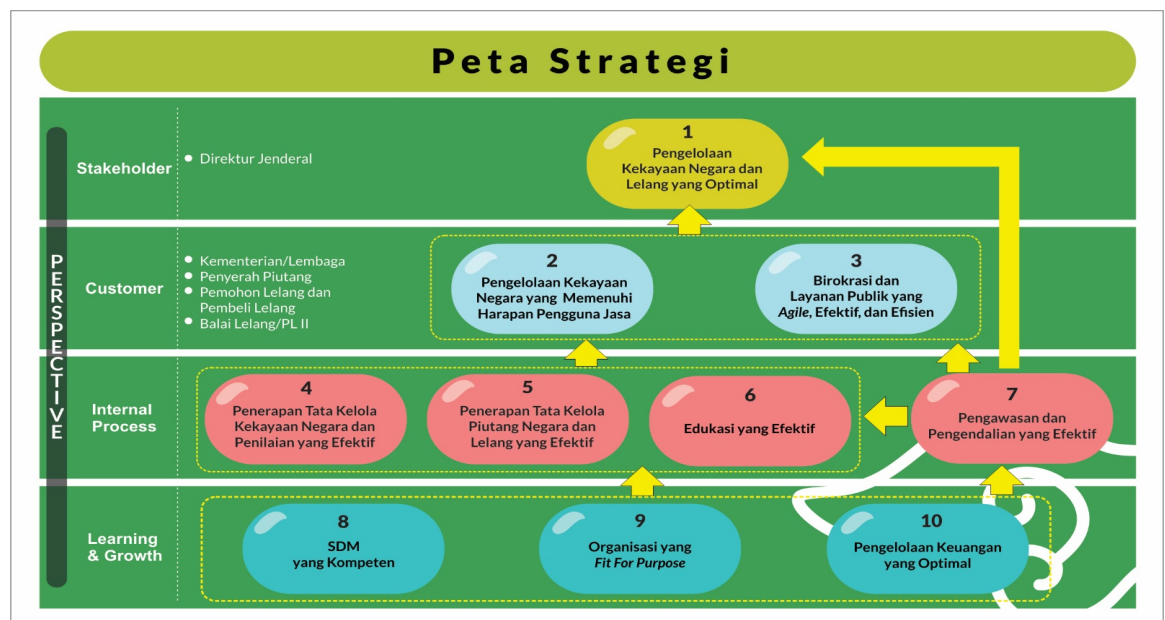


NOMOR 8/KN.28/2021  
 KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU  
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
 KEMENTERIAN KEUANGAN  
 TAHUN 2021

## Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, saya akan:

4. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
5. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
6. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU**  
**UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-N Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	88
		2b CP Persentaer Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Leyanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,68
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang dDisertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	34%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
9.	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK	75

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10-a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp193.653.000,00</b>
4. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp5.062.000,00
5. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp33.092.000,00
6. Pengelolaan Aset	Rp155.499.000,00
<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp1.334.145.000,00</b>
5. Legislasi dan Litigasi	Rp13.272.000,00
6. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.309.417.000,00
7. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp1.440.000,00
8. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp10.016.000,00

Manado, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara  
Tengah Gorontalo dan Maluku Utara,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
Dan Lelang Palu

Aloysius Yanis Dhaniarto  
NIP 196601261991031001

Devi Lesilolo  
NIP 196503031985031001

## KONTRAK KINERJA

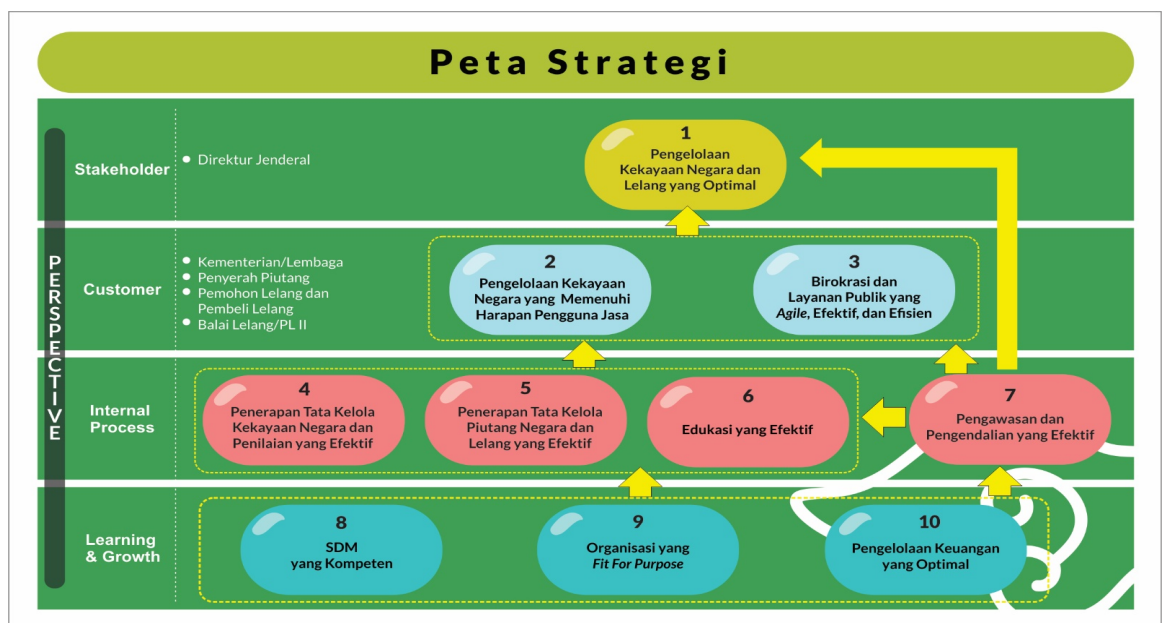


**NOMOR 8/KN.28/2021**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2021**

### Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, saya akan:

4. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
5. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
6. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU**  
**UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	5,76%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	19,49%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,68
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	7,41%
		4b-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5b-CP Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%
		5c-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
		9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp133.252.000,00
8. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp3.426.000,00
9. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp150.000,00
10. Pengelolaan Aset	Rp129.676.000,00
Dukungan Manajemen	Rp1.281.211.000,00
11. Legislasi dan Litigasi	Rp16.208.000,00
12. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.257.083.000,00
13. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp1.440.000,00
14. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp6.480.000,00

Manado, 12 Oktober 2021

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi  
Utara Tengah Gorontalo dan Maluku  
Utara,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Palu

Arif Bintarto Yuwono

Krisdianto